



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

UNIT KERJA : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **TIAT SURTIATI SUWARDI**
2. Jabatan : **KEPALA DINAS**
3. NHK : **776146**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 4.282.420.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 108 m2/140 m2 di KAB / KOTA SIDOARJO, HASIL SENDIRI Rp. 910.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 108 m2/80 m2 di KAB / KOTA SIDOARJO, HASIL SENDIRI Rp. 735.000.000
3. Tanah Seluas 414 m2 di KAB / KOTA PASURUAN, HASIL SENDIRI Rp. 95.000.000
4. Tanah Seluas 144 m2 di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 185.000.000
5. Tanah Seluas 360 m2 di KAB / KOTA BULELENG, HASIL SENDIRI Rp. 265.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/105 m2 di KAB / KOTA SIDOARJO, HASIL SENDIRI Rp. 1.100.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 36 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 199 m2/63 m2 di KAB / KOTA JOMBANG, HASIL SENDIRI Rp. 692.420.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 271.000.000**

1. MOBIL, EXPANDER SPORT Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000



2. MOTOR, BENNELI SPORT Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.
15.000.000
3. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp.
6.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 417.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 372.568.250

F. HARTA LAINNYA Rp. 100.000.000

Sub Total Rp. 5.443.488.250

III. HUTANG Rp. 75.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 5.368.488.250

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.